

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (L K j I P)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin Tahun 2023 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka DPMD melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKjIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan (LKjIP) DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2023. Akhirnya semoga (LKjIP) Tahun anggaran 2023 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan juga diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Rantau, Februari 2024

KEPALA,



Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja Tahun 2023 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan tetap berdasar pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum telah sesuai dengan yang ditargetkan. Rata-rata capaian sasaran strategis tersebut adalah **116,01%**. Total anggaran untuk melaksanakan sasaran- sasaran tersebut sebesar **Rp 65.773.761.790,00** dengan serapan sebesar **Rp. 65.254.880.363,00** atau **99,21%**. Capaian kinerja sasaran dan capaian realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 518.881.427,00** atau **0,79%**.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 telah ditetapkan 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan presentase capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05	75,75	98,31%
2	Meningkatnya ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	47,1	94,2%
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	8,73%	9,52%	109,05%
		Persentase Desa Swasembada	19,047%	30,952%	162,50%
Rata-Rata Capaian Kinerja					<u>116,01%</u>

Secara keseluruhan rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 dinyatakan “*sangat berhasil*”, karena melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 4 indikator kinerja dari 3 sasaran, sebanyak 2 indikator dinyatakan “*Sangat berhasil*” karena capaiannya melebihi 100% dari target dan 2 indikator dinyatakan “*berhasil*” karena capaiannya hampir 100%.

Rantau, Februari 2024

KEPALA,



Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
<u>IKHTISAR EKSEKUTIF</u>	<u>ii</u>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.4. SDM dan Sarana Prasarana	8
1.5. Permasalahan dan Isu Strategis	9
1.6. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi SAKIP DPMD Tahun 2022	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis	14
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	31
3.1.2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2022 Dan Tahun 2023	48
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah	48
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	49
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	57
3.2. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (action plan) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat di capai dengan efektif dan efisien.

Dalam Melaksanakan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan Fungsi :

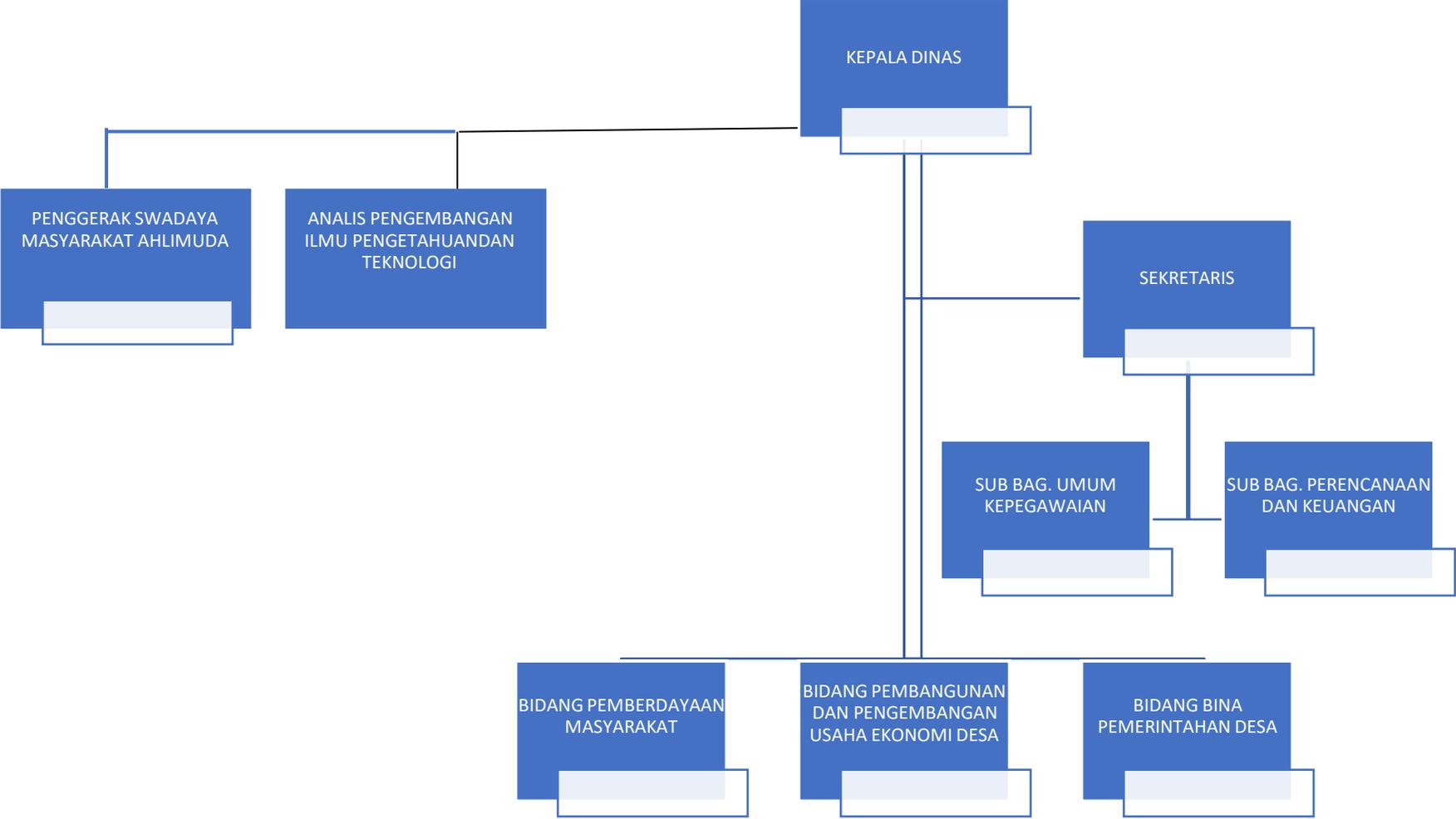
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT
- e. pengelolaan kesekretariat

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin No. 33 Tahun 2018, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin, organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri 1 Kepala Dinas, 1 Sekretariat, 3 Bidang dan 6 Jabatan Fungsional Tertentu. Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2018 dengan bagan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN**



Sedangkan Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Bina Pemerintahan Desa
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Bina Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas
- i. mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup dinas
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- k. Susunan organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa dan pengembangan kapasitas aparatur serta penataan dan evaluasi perkembangan desa. Susunan organisasi Bidang Bina Pemerintahan Desa terdapat 2 jabatan fungsional yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.

c. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dan Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat. Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat 2 jabatan fungsional yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.

d. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna. Susunan Organisasi Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi terdapat 1 jabatan fungsional yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda dan Analis Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sasaran umum pencapaian tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- d. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar desa
- e. Meningkatnya usaha ekonomi Desa melalui Fasilitasi permodalan bagi pengembangan BUMDes
- f. Meningkatnya peranan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa melalui sosialisasi / pembinaan / pelatihan / pembinaan/ monitoring dari jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa.
- g. Meningkatnya keterpaduan program dan kegiatan masuk desa dan peningkatan sistem perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musrembang Desa
- h. Meningkatnya peranan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian stimulan pembangunan desa
- i. Upaya mendukung program pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kehudupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik dan mandiri melalui Karya Bhakti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)
- j. Terlaksananya pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemerintahan desa, penetapan dan penegasan batas desa, penyusunan database / kelurahan, bimtek dan koordinasi melalui pendataan, evaluasi dan lomba-lomba
- k. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset desa / kelurahan melalui bimtek/ sosialisasi / pelatihan dalam inventarisasi / pendataan keuangan dan asset desa
- l. Data profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan

- m. Meningkatnya jumlah pelatihan / sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat perdesaan serta tersusunnya sinkronisasi dan training of trainer
- n. Meningkatnya peran Badan Permusyawaratan Desa melalui bimbingan teknis / pelatihan, orientasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
- o. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan PKK dan pelayanan Posyandu

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin maka tugas Pokok dari DPMD adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, jika dijabarkan lebih lanjut maka tugas DPMD adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan pelaksanaan kebijakan teknis teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan desa, kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- c. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT
- d. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan

1.4. SDM DAN SARANA PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai DPMD Kabupaten Tapin.
- 2) Ruang kerja
SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kantor tersendiri dimana sekretarian dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.
- 3) Perlengkapan kerja
Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.
- 4) Peralatan Kerja
Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

a. Dukungan Sumber Daya

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, Sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kinerja sumber daya manusia merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukkan jumlah energi (fisik atau mental) yang digunakan oleh individu untuk menjalankan suatu tugas.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Tapin telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai DPMD Kabupaten Tapin.
- 2) Ruang kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kantor tersendiri dimana sekretarian dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.
- 3) Perlengkapan kerja
Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain sebagainya.
- 4) Peralatan Kerja
Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD saat ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2018 s/d 2023 sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
 - Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa
 - Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa
 - Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan
 - Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, pembangunan desa
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan
 - Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan
4. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
 - Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali
5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan

Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam

- Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa
 - Pengelolaan aset dan keuangan desa
 - Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital
 - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan (QW)
 - Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa
 - Mengembangkan kerjasama antar desa
 - Melaksanakan penataan desa
 - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
6. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan
- Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU desasejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP sistem keuangan desa
 - Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap
 - Mempersiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, pemerintah pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin masih menemui beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan
3. Kurang maksimalnya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal

6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan

1.6. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
3. PP No.08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
4. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5. Permenpan RB No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

1.7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP DPMD Tahun 2022

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Perencanaan Kinerja: a. Mempertahankan dan meningkatkan sistem kinerja yang sudah baik	a. DPMD akan terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan sistem kinerja yang sudah ada untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi.

2	<p>Pengukuran Kinerja:</p> <p>a. Meningkatkan aplikasi yang digunakan sampai pada pengukuran capaian kinerja tidak terbatas pada pengumpulan data saja.</p> <p>b. Memanfaatkan hasil monitoring atas capaian kinerja untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan tingkat besaran organisasi • Mengefisienkan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja 	<p>a. DPMD sudah menggunakan aplikasi ESakip dan akan terus berusaha meningkatkan aplikasi yang digunakan sampai pada capaian kinerja tidak terbatas pada pengumpulan data saja untuk meningkatkan nilai pada pengukuran kinerja SKPD</p> <p>b. Memanfaatkan hasil monitoring capaian kinerja untuk menentukan tingkat besaran organisasi dan mengefisienkan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja</p>
3	<p>Pelaporan Kinerja</p> <p>a. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja sesuai dengan standart.</p> <p>b. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.</p>	<p>a. DPMD akan terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja sesuai dengan standart dan</p> <p>b. DPMD akan memanfaatkan informasi dalam LKIP untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya</p>
4	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p> <p>a. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja</p> <p>b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk peningkatan akuntabilitas kinerja</p> <p>c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja</p>	<p>a. DPMD akan memanfaatkan hasil kinerja masing-masing bidang guna meningkatkan pencapaian kinerja</p> <p>b. DPMD akan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk peningkatan akuntabilitas kinerja</p> <p>c. DPMD akan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, Dokumen Rencana Strategi setidaknya memuat tujuan, sasaran dan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin secara organisasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategi Dinas, Badan dan Kantor pada lingkup pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Rumusan Tujuan dan sasaran untuk Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai 3 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah; dan
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa.

Sasaran - sasaran strategis tersebut terdiri dari indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2018-2023. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah

kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 – 2023.

Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)
3. Persentase Desa Mandiri
4. Persentase Desa Swasembada

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang di tempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

a. Kebijakan

Kebijakan yang dimaksudkan disini adalah segala ketentuan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman, atau petunjuk dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2023

. b. Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin pada tahun Anggaran 2023, adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 2) Program Penataan Desa
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas ke dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05
2	Meningkatnya ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	50
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	8,73%
		Persentase Desa Swasembada	19,047%

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	<p><u>Komponen Penilaian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 30% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 15%
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	Kompilasi Nilai dari masing-masing unsur yang ada pada aplikasi IP- ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Tinggi nilai antara 91 – 100 • Tinggi nilai antara 81 – 90 • Sedang nilai antara 71 – 80 • Rendah nilai antara 61 – 70 • Sangat rendah nilai 60 ke bawah
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kabupaten Tapin}} \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Tertinggal : < 0,491 2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599 3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707 4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815 5. Desa Mandiri : > 0,815
	Persentase Desa Swasembada	$\frac{\text{Jumlah Desa Swasembada}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kabupaten Tapin}} \times 100\%$	

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan Anggaran Tahun 2023 mulai dari Eselon II sampai dengan Eselon IV atau setara dengan jabatan fungsional mempunyai target sebagai berikut :

Tabel 1. Target Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	8,73%
			Persentase Desa Swasembada	19,047%
2	Eselon 3 (Sekretariat)	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	77,05
		Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%
		Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	90%
3	Eselon 3 (Bidang PM)	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10,31%
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Persentase BKAD yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan	50%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
4	Eselon 3 (Bid. Pemdes)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang ditata sesuai dengan ketentuan	60%
5	Eselon 3 (Bid. PPUED)	Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status Bumdes Maju	5 %
6	Eselon 4 Sekretariat	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %
		Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100 %
			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%
		Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100 %		

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
7	Esselon 4 Sub Bidang PM	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	81%
		Terlaksananya Peningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga masyarakat yang dibina	100%
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase hasil Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditindaklanjuti	50%
8	Esselon 4 Sub Bidang PM	Meningkatnya kerjasama kelembagaan antar desa	Persentase kelembagaan antar desa yang bekerja sama	100%
		Terlaksananya peningkatan kapasitas badan kerjasama antar desa dalam kabupaten	Persentase Badan kerjasama antar desa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan	70%
		Meningkatnya kerjasama Badan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Persentase MoU yang dihasilkan	42%
9	Esselon 4 Sub Bidang Pemdes	Meningkatnya pengelolaan Tata Kelola Keuangan Desa	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan	90%
		Meningkatnya tata kelola aset desa	Persentase desa yang melakukan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan	80%
		Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan	90%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
10	Eselon 4 Sub Bidang Pemdes	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	Persentase Aparatur Desa yang terpilih sesuai ketentuan yang berlaku	90%
		Meningkatnya SOTK Pemerintah Desa	Persentase Desa yang SOTK Desanya sesuai ketentuan	90%
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Desa	Persentase wilayah desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	60%
11	Eselon 4 Sub Bidang PPUED	Meningkatnya bumdes dan bumdesma yang aktif	Persentase Bumdes dan Bumdesma yang aktif	35%
		Meningkatnya bumdes dan bumdesma yang menghasilkan PADes	Persentase Bumdes dan bumdesma yang menghasilkan PADes	57%
		Terlaksananya pembinaan dan pendampingan bumdesa dan bumdesma	Persentase bumdes dan bumdesma yang dibina	100%
		Meningkatnya tata kelola administrasi, laporan keuangan bumdes dan bumdesma	Persentase bumdes dan bumdesma yang tertib administrasi dan berbadan hukum	35%
		Meningkatnya sumber daya pengelola bumdes dan bumdesma	Persentase pengelola bumdes dan bumdesma yang memahami tugas dan fungsi	100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
12	Eselon 4 Sub Bidang PPUED	Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Persentase desa yang menghasilkan inovasi	50 %
			Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	5%
		Meningkatnya posyantek dan posyantekdes yang aktif	Persentase posyantek dan posyantekdes yang aktif	50%
		Meningkatnya tata kelola administrasi dalam posyantek dan posyantekdes	Persentase posyantek dan posyantekdes yang tertib administrasi	100%

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Tapin dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada bagian lampiran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2023 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2023, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	> 100 %	Sangat Berhasil
2.	Diatas 90% sampai dengan 100%	Berhasil
3.	Diatas 80% sampai dengan 90%	Cukup Berhasil
4.	Sampai dengan 80 %	Kurang Berhasil

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam rangka untuk mengukur keberhasilan dari suatu sasaran strategis. Dalam meningkatkan kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMD Kabupaten Tapin tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPMD tahun 2023 dengan realisasinya.

Berikut merupakan tabel perbandingan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin antara Tahun 2022 dan Tahun 2023 beserta capaiannya . Dari data di bawah ini terdapat perbedaan sasaran dan indikator kinerja disebabkan karena adanya revisi Renstra untuk Tahun 2023.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Utama / Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,700	0,7253	103,61%
		Persentase Desa Berstatus Maju	32,539%	76,985%	236,60%
		Persentase Desa Berstatus Swasembada	12,698%	13,492%	106,25%

Capaian Kinerja Utama / Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05	75,75	98,31%

2	Meningkatnya ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	47,1	94,2%
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	8,73%	9,52%	109,05%
		Persentase Desa Swasembada	19,047%	30,952%	162,50%

Laporan di bawah ini menunjukkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 mulai dari Eselon 2 sampai dengan Eselon 4 beserta realisasinya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Utama / Sasaran Tahun 2023

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Esselon 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05	75,75
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	47,1
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	8,73%	9,52%
			Persentase Desa Swasembada	19,047%	30,952%
2	Esselon 3 (Sekretariat)	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	77,05	75,75
		Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%	90%
		Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	90%	90%
3	Esselon 3 (Bidang PM)	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10,31%	10,31%
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Persentase BKAD yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan	50%	50%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
4	Eselon 3 (Bid. Pemdес)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang ditata sesuai dengan ketentuan	60%	95%
5	Eselon 3 (Bid. PPUED)	Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status Bumdes Maju	5 %	4%
6	Eselon 4 Sekretariat	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100 %	100 %
			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %	100 %
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %	100 %
		Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100 %	100 %

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
7	Eselon 4 Sub Bidang PM	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	81%	80%
		Terlaksananya Peningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga masyarakat yang dibina	100%	100%
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase hasil Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditindaklanjuti	50%	50%
8	Eselon 4 Sub Bidang PM	Meningkatnya kerjasama kelembagaan antar desa	Persentase kelembagaan antar desa yang bekerja sama	100%	100%
		Terlaksananya peningkatan kapasitas badan kerjasama antar desa dalam kabupaten	Persentase Badan kerjasama antar desa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan	70%	70%
		Meningkatnya kerjasama Badan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Persentase MoU yang dihasilkan	42%	42%
9	Eselon 4 Sub Bidang Pemdes	Meningkatnya pengelolaan Tata Kelola Keuangan Desa	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan	90%	95%
		Meningkatnya tata kelola aset desa	Persentase desa yang melakukan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan	80%	90%

		Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan	90%	100%
--	--	------------------------------	---	-----	------

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
10	Esselon 4 Sub Bidang Pemdes	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	Persentase Aparatur Desa yang terpilih sesuai ketentuan yang berlaku	90%	100%
		Meningkatnya SOTK Pemerintah Desa	Persentase Desa yang SOTK Desanya sesuai ketentuan	90%	95%
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Desa	Persentase wilayah desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	60%	100%
11	Esselon 4 Sub Bidang PPUED	Meningkatnya bumdes dan bumdesma yang aktif	Persentase Bumdes dan Bumdesma yang aktif	35%	73%
		Meningkatnya bumdes dan bumdesma yang menghasilkan PADes	Persentase Bumdes dan bumdesma yang menghasilkan PADes	57%	61%
		Terlaksananya pembinaan dan pendampingan bumdesa dan bumdesma	Persentase bumdes dan bumdesma yang dibina	100%	100%
		Meningkatnya tata kelola administrasi, laporan keuangan bumdes dan bumdesma	Persentase bumdes dan bumdesma yang tertib administrasi dan berbadan hukum	35%	34%
		Meningkatnya sumber daya pengelola bumdes dan bumdesma	Persentase pengelola bumdes dan bumdesma yang memahami tugas dan fungsi	100%	100%

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
12	Eselon 4 Sub Bidang PPUED	Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Persentase desa yang menghasilkan inovasi	50 %	30%
			Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	5%	5%
		Meningkatnya posyantek dan posyantekdes yang aktif	Persentase posyantek dan posyantekdes yang aktif	50%	50%
		Meningkatnya tata kelola administrasi dalam posyantek dan posyantekdes	Persentase posyantek dan posyantekdes yang tertib administrasi	100%	20%

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05	75,75	98,31%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.540.812
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	47,1	94,02%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.356.085.700
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	8,73%	9,52%	109,05%	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	268.756.392
		Persentase Desa Swasembada	19,047 %	30,952%	162,50%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	104.601.228

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijabarkan deskripsi pencapaian program dan kegiatan DPMD Kabupaten Tapin Tahun 2023 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 1 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* dengan total anggaran sebesar **Rp. 7.540.812,-** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 7.481.350,-** atau **99,21%** dari anggaran dengan capaian kinerja sebesar **98,31%** dari target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05	75,75	98,31%

Sumber : LHE Sakip Inspektorat

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atas target sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” adalah sebesar **98,31%** yang berarti masuk dalam kategori “**berhasil**”.



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**
KABUPATEN TAPIN
dpmd.profil@tapinkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAKIP) TAHUN 2022

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2022
a. Perencanaan Kinerja	30	26,10
b. Pengukuran Kinerja	30	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15	10,05
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	75,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB



Sumber : LHE Sakip Inspektorat

Sasaran 2 : Meningkatnya ASN Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 2 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan *Administrasi Umum Perangkat Daerah* dengan total anggaran sebesar **Rp. 3.356.085.700,-** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 3.342.823.238,-** atau **99,60%** dari anggaran dengan capaian kinerja sebesar **94,2%** dari target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	47,1	94,2%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atas target sasaran “Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah” adalah sebesar **94,2%** yang berarti masuk dalam kategori “*berhasil*”. Namun secara realisasi masih berada pada kategori sangat rendah karena masih mempunyai nilai kurang dari 60. Untuk kedepannya DPMD berusaha lebih meningkatkan lagi nilai IP-ASN ini agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tentunya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia ASN yang ada di DPMD itu sendiri untuk bisa meningkatkan kesadaran masing-masing ASN nya untuk lebih meningkatkan nilai IP-ASN nya.

No	Nama	NIP	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	IP-ASN
1	Drs. RAHMADI	197603021994121001	15	25	25	5	70
2	Sufian Suri, S.T, M.AP	196903191993031004	20	15	25	5	65
3	NOR IZATIL HASANAH, S.SOS	197001271989032003	15	0	25	5	45
4	TOMY YULIAN ARRIZKY, SE, MM	197207171999031007	20	0	25	5	50
5	M.E. IWAN SATRIYANSYAH, S.SOS	198206212010011017	15	10	25	5	55
6	Hj SRI YULIANTHI, S.Sos	197107031993032010	15	10	25	5	55
7	DINA HANDAYANI, A. Md	197810092009042002	10	0	25	5	40
8	ABDUL MALIK, AM.D	196609191989031014	10	0	25	5	40
9	DIDIN MUHTADIN, S.AP	197309201996031001	15	0	25	5	45
10	ENNY HIDYA, S.Th.I	197904102014062007	15	0	25	5	45
11	SERLIA NOOR, S.Pi	197912042014061001	0	10	25	5	40
12	MARISA ANTI RAINI, S.Pi	197912052010012010	15	0	25	5	45
13	FATHUR RAHMAN, SE	198410312010011012	15	10	25	5	55

14	HAMBERAN	197010102007011048	5	0	25	5	35
15	MULYADI	197603142007011024	5	0	25	5	35
16	MUHAMMAD AGIL ANWARI, S.IP	199408132020121005	15	0	25	5	45
17	NURUL FAJRIAH, S.IP	199603262020122009	15	0	25	5	45
18	RAMADHANI, S.I.P	199901152022021001	15	40	25	5	85
19	LUTFI AWWALI, A.Md.Kom	198602152020121004	10	17.5	25	5	57.5
20	INDRA NOOR FAJRI KURNIAWAN, SE	198808092020121003	0	17.5	25	5	47.5
21	SRI NOVARIYANTI, A,Md	198911132020122003	0	0	25	5	30
22	RUDI HARTONO	197307102007011015	1	0	1	5	7
IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			11,2	7,0	23,9	5,0	47,1

Sumber : Aplikasi Padaringan

Sasaran 3 :

Pencapaian sasaran 3 dengan 2 indikator kinerja yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	8,73%	9,52%	109,05%
		Persentase Desa Swasembada	19,047%	30,952%	162,50%

1. *Persentase Desa Mandiri* didukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan total anggaran sebesar **268.756.392,-** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 243.705,850,-** atau **90,68%** dari anggaran dengan capaian kinerja sebesar **109,05%** dari target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Klasifikasi Status Desa

- I. Mandiri** > 0,8155
- II. Maju** > 0,7072 - < 0,8155
- III. Berkembang** > 0,5989 - < 0,7072
- IV. Tertinggal** > 0,4907 - < 0,5989
- V. Sangat Tertinggal** < 0,4907

5

PEMERINGKATAN DESA SE-KABUPATEN TAPIN							
HASIL PEMUTAKHIRAN DATA IDM TAHUN 2023							
No	Kecamatan	Desa	Nilai Indeks				Status
			IKS	IKE	IKL	IDM	
1	Piani	Miawa	0,9543	0,8833	0,8667	0,9014	Mandiri
2	Binuang	Pulau Pinang	0,9086	0,7333	0,9333	0,8584	Mandiri
3	Salam Babaris	Salam Babaris	0,9371	0,8333	0,8000	0,8568	Mandiri
4	Salam Babaris	Pantai Cabe	0,8800	0,8167	0,8667	0,8544	Mandiri
5	Lokpaikat	Binderang	0,9257	0,7667	0,8667	0,8530	Mandiri
6	Candi Laras Selatan	Baringin A	0,9486	0,9333	0,6667	0,8495	Mandiri
7	Binuang	Pualam Sari	0,9257	0,7500	0,8667	0,8475	Mandiri
8	Lokpaikat	Bataratat	0,8800	0,7833	0,8667	0,8433	Mandiri
9	Lokpaikat	Lokpaikat	0,8629	0,7833	0,8667	0,8376	Mandiri
10	Bungur	Bungur	0,8800	0,6833	0,9333	0,8322	Mandiri

11	Tapin Utara	Perintis Raya	0,8343	0,7667	0,8667	0,8225	Mandiri
12	Tapin Utara	Banua Halat Kiri	0,8286	0,7000	0,9333	0,8206	Mandiri
13	Tapin Tengah	Labung	0,8286	0,6833	0,9333	0,8151	Maju
14	Bakarangan	Gadung Keramat	0,8114	0,7000	0,9333	0,8149	Maju
15	Candi Laras Selatan	Marampiau	0,8229	0,7500	0,8667	0,8132	Maju
16	Candi Laras Utara	Margasari Hilir	0,8971	0,8667	0,6667	0,8102	Maju
17	Bakarangan	Paul	0,8114	0,7333	0,8667	0,8038	Maju
18	Binuang	Padang Sari	0,8571	0,6833	0,8667	0,8024	Maju
19	Tapin Selatan	Hatiwin	0,7829	0,7500	0,8667	0,7998	Maju
20	Tapin Selatan	Cempaka	0,7943	0,7333	0,8667	0,7981	Maju
21	Salam Babaris	Suato Lama	0,9257	0,7333	0,7333	0,7975	Maju
22	Bungur	Hangui	0,7829	0,6667	0,9333	0,7943	Maju
23	Tapin Tengah	Mandurian	0,7829	0,7333	0,8667	0,7943	Maju
24	Lokpaikat	Parandakan	0,8457	0,7333	0,8000	0,7930	Maju
25	Candi Laras Selatan	Marampiau Hilir	0,8114	0,7000	0,8667	0,7927	Maju
26	Bungur	Kalumpang	0,7943	0,7167	0,8667	0,7925	Maju
27	Bakarangan	Waringin	0,8000	0,7000	0,8667	0,7889	Maju
28	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hilir	0,8971	0,8000	0,6667	0,7879	Maju
29	Bakarangan	Parigi Kacil	0,7600	0,7333	0,8667	0,7867	Maju
30	Binuang	Pulau Pinang Utara	0,9029	0,7833	0,6667	0,7843	Maju
31	Hatungun	Batu Hapu	0,8686	0,8167	0,6667	0,7840	Maju
32	Tapin Selatan	Tatakan	0,8514	0,8333	0,6667	0,7838	Maju
33	Binuang	A.Yani Pura	0,9314	0,7500	0,6667	0,7827	Maju
34	Salam Babaris	Suato Baru	0,8114	0,6667	0,8667	0,7816	Maju
35	Tapin Tengah	Serawi	0,8114	0,6667	0,8667	0,7816	Maju
36	Tapin Tengah	Pematang Karang	0,8057	0,6667	0,8667	0,7797	Maju
37	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hulu	0,8114	0,7833	0,7333	0,7760	Maju
38	Bungur	Linuh	0,7771	0,7500	0,8000	0,7757	Maju
39	Tapin Tengah	Pandulangan	0,7771	0,6167	0,9333	0,7757	Maju
40	Bakarangan	Tangkawang	0,7600	0,7000	0,8667	0,7756	Maju
41	Bungur	Timbung	0,7429	0,7167	0,8667	0,7754	Maju
42	Bakarangan	Gadung	0,7714	0,6833	0,8667	0,7738	Maju
43	Bakarangan	Parigi	0,7829	0,6667	0,8667	0,7721	Maju
44	Tapin Utara	Antasari	0,8457	0,8000	0,6667	0,7708	Maju
45	Binuang	Gunung Batu	0,8286	0,6167	0,8667	0,7706	Maju
46	Lokpaikat	Ayunan Papan	0,8914	0,7500	0,6667	0,7694	Maju
47	Bakarangan	Tangkawang Baru	0,7543	0,6833	0,8667	0,7681	Maju
48	Tapin Tengah	Hiyung	0,7657	0,6667	0,8667	0,7663	Maju
49	Bungur	Rantau Bujur	0,7314	0,7000	0,8667	0,7660	Maju
50	Binuang	Tungkap	0,8229	0,8000	0,6667	0,7632	Maju
51	Tapin Selatan	Rumintin	0,8229	0,7333	0,7333	0,7632	Maju
52	Tapin Utara	Jingah Babaris	0,8343	0,7833	0,6667	0,7614	Maju
53	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas	0,8000	0,8167	0,6667	0,7611	Maju
54	Bungur	Paring Guling	0,8000	0,7500	0,7333	0,7611	Maju
55	Tapin Selatan	Harapan Masa	0,7829	0,7667	0,7333	0,7610	Maju
56	Candi Laras Selatan	Candi Laras	0,7714	0,5667	0,9333	0,7571	Maju
57	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas Hulu	0,8000	0,8000	0,6667	0,7556	Maju
58	Tapin Tengah	Andhika	0,7257	0,6667	0,8667	0,7530	Maju
59	Tapin Tengah	Pematang Karang Hulu	0,8571	0,7333	0,6667	0,7524	Maju
60	Lokpaikat	Puncak Harapan	0,8229	0,8333	0,6000	0,7521	Maju

61	Bungur	Shabah	0,7543	0,6333	0,8667	0,7514	Maju
62	Binuang	Mekar Sari	0,8686	0,7167	0,6667	0,7506	Maju
63	Tapin Tengah	Papagan Makmur	0,8000	0,5833	0,8667	0,7500	Maju
64	Bakarangan	Masta	0,7143	0,6667	0,8667	0,7492	Maju
65	Piani	Baramban	0,8457	0,7333	0,6667	0,7486	Maju
66	Tapin Selatan	Lawahan	0,8286	0,8167	0,6000	0,7484	Maju
67	Tapin Selatan	Tandui	0,7943	0,7833	0,6667	0,7481	Maju
68	Tapin Utara	Antasari Hilir	0,8571	0,7167	0,6667	0,7468	Maju
69	Lokpaikat	Budi Mulya	0,8057	0,7667	0,6667	0,7463	Maju
70	Piani	Buniin Jaya	0,8686	0,7000	0,6667	0,7451	Maju
71	Candi Laras Selatan	Margasari Hulu	0,8571	0,7000	0,6667	0,7413	Maju
72	Tapin Tengah	Tirik	0,7886	0,7667	0,6667	0,7406	Maju
73	Bungur	Banua Padang	0,7371	0,6167	0,8667	0,7402	Maju
74	Tapin Utara	Lumbu Raya	0,8686	0,6833	0,6667	0,7395	Maju
75	Hatungun	Hatungun	0,9143	0,6333	0,6667	0,7381	Maju
76	Tapin Tengah	Pandahan	0,8629	0,6833	0,6667	0,7376	Maju
77	Bungur	Banua Padang Hilir	0,7943	0,6167	0,8000	0,7370	Maju
78	Hatungun	Matang Batas	0,7943	0,7500	0,6667	0,7370	Maju
79	Tapin Utara	Badaun	0,7257	0,6833	0,8000	0,7363	Maju
80	Hatungun	Tarungin	0,8400	0,7667	0,6000	0,7356	Maju
81	Tapin Utara	Kakaran	0,8229	0,7167	0,6667	0,7354	Maju
82	Piani	Balawaian	0,8171	0,7167	0,6667	0,7335	Maju
83	Tapin Utara	Banua Hanyar	0,8000	0,7333	0,6667	0,7333	Maju
84	Lokpaikat	Bitahan Baru	0,8457	0,6833	0,6667	0,7319	Maju
85	Salam Babaris	Kambang Habang Lama	0,8457	0,7500	0,6000	0,7319	Maju
86	Bungur	Bungur Baru	0,8457	0,6833	0,6667	0,7319	Maju
87	Tapin Utara	Keramat	0,7771	0,7500	0,6667	0,7313	Maju
88	Tapin Selatan	Sawang	0,8400	0,7500	0,6000	0,7300	Maju
89	Bakarangan	Bakarangan	0,8229	0,7000	0,6667	0,7298	Maju
90	Tapin Selatan	Timbaan	0,8057	0,7167	0,6667	0,7297	Maju
91	Bungur	Purut	0,7714	0,7500	0,6667	0,7294	Maju
92	Piani	Batung	0,7829	0,7333	0,6667	0,7276	Maju
93	Tapin Selatan	Suato Tatakan	0,8457	0,6667	0,6667	0,7263	Maju
94	Salam Babaris	Kambang Habang Baru	0,8286	0,7500	0,6000	0,7262	Maju
95	Tapin Tengah	Kepayang	0,8286	0,6833	0,6667	0,7262	Maju
96	Tapin Tengah	Sungai Bahalang	0,8286	0,6833	0,6667	0,7262	Maju
97	Candi Laras Selatan	Baringin B	0,8571	0,6500	0,6667	0,7246	Maju
98	Bakarangan	Bundung	0,8057	0,7000	0,6667	0,7241	Maju
99	Tapin Utara	Banua Hanyar Hulu	0,8343	0,6667	0,6667	0,7225	Maju
100	Tapin Tengah	Sukaramai	0,8000	0,7000	0,6667	0,7222	Maju

101	Hatungun	Kambang Kuning	0,8457	0,6500	0,6667	0,7208	Maju
102	Bakarangan	Ketapang	0,8114	0,6833	0,6667	0,7205	Maju
103	Candi Laras Utara	Pariok	0,7886	0,7000	0,6667	0,7184	Maju
104	Tapin Tengah	Pematang Karangan Hilir	0,8171	0,6667	0,6667	0,7168	Maju
105	Hatungun	Burakai	0,7829	0,7000	0,6667	0,7165	Maju
106	Hatungun	Asam Randah	0,8971	0,5833	0,6667	0,7157	Maju
107	Tapin Utara	Banua Halat Kanan	0,8400	0,7000	0,6000	0,7133	Maju
108	Tapin Tengah	Batang Lantik	0,8057	0,6667	0,6667	0,7130	Maju
109	Tapin Tengah	Mandurian Hilir	0,8229	0,6333	0,6667	0,7076	Maju
110	Piani	Batu Ampar	0,8057	0,6500	0,6667	0,7075	Maju
111	Candi Laras Utara	Batalas	0,8057	0,6333	0,6667	0,7019	Berkembang
112	Hatungun	Bagak	0,7886	0,6500	0,6667	0,7017	Berkembang
113	Candi Laras Selatan	Pabaungan Pantai	0,7543	0,6833	0,6667	0,7014	Berkembang
114	Candi Laras Utara	Sungai Puting	0,8114	0,6000	0,6667	0,6927	Berkembang
115	Candi Laras Selatan	Baulin	0,7600	0,6500	0,6667	0,6922	Berkembang
116	Piani	Harakit	0,7886	0,6833	0,6000	0,6906	Berkembang
117	Piani	Pipitak Jaya	0,8514	0,5333	0,6667	0,6838	Berkembang
118	Candi Laras Utara	Keladan	0,7029	0,6667	0,6667	0,6787	Berkembang
119	Candi Laras Utara	Buas-Buas Hilir	0,7257	0,6000	0,6667	0,6641	Berkembang
120	Candi Laras Utara	Buas-Buas	0,7200	0,6000	0,6667	0,6622	Berkembang
121	Candi Laras Utara	Teluk Haur	0,6400	0,6667	0,6667	0,6578	Berkembang
122	Candi Laras Utara	Sungai Salai Hilir	0,7486	0,5000	0,6667	0,6384	Berkembang
123	Candi Laras Utara	Sawaja	0,6800	0,5667	0,6667	0,6378	Berkembang
124	Candi Laras Utara	Rawana	0,6229	0,6000	0,6667	0,6298	Berkembang
125	Candi Laras Utara	Rawana Hulu	0,6457	0,5667	0,6667	0,6263	Berkembang
126	Candi Laras Utara	Sungai Salai	0,7086	0,5000	0,6667	0,6251	Berkembang

**Data IDM
Kabupaten Tapin
Tahun 2023**

I. Mandiri : 12 Desa

II. Maju : 98 Desa

III. Berkembang : 16 Desa

8

Pemeringkatan Kabupaten se-Kalimantan Selatan Berdasarkan Jumlah Desa Mandiri

1. Tabalong (41 Desa)
2. Tanah Bumbu (40 Desa)
3. Hulu Sungai Utara (32 Desa)
4. Banjar (31 Desa)
5. Barito Kuala (29 Desa)
6. Kotabaru (25 Desa)
7. Tanah Laut (23 Desa)
8. Balangan (22 Desa)
9. Hulu Sungai Selatan (20 Desa)
10. Hulu Sungai Tengah (20 Desa)
11. Tapin (12 Desa)

12

Daftar Desa Mandiri Kabupaten Tapin Tahun 2023

- Pulau Pinang (Binuang)
- Pualam Sari (Binuang)
- Banua Halat Kiri (Tapin Utara)
- Perintis Raya (Tapin Utara)
- Baringin A (Candi Laras Selatan)
- Miawa (Piani)
- Bungur (Bungur)
- Binderang (Lokpaikat)
- Lokpaikat (Lokpaikat)
- Bataratat (Lokpaikat)
- Salam Babaris (Salam Babaris)
- Pantai Cabe (Salam Babaris)

9



Status desa mandiri mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 12 Desa Mandiri. Hal ini dikarenakan sudah ada kesadaran dari perangkat desa dan masyarakatnya untuk lebih meningkatkan status desa mereka menjadi desa mandiri. Dimana dengan meningkatnya status desa mereka menjadi desa mandiri maka ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan melebihi status desa maju dan berkembang. Keuntungan yang didapatkan antara lain pencairan dana desa menjadi 2 tahap yaitu sebesar 60% dan 40% dimana sebelumnya pada status desa maju adalah 3 tahap. Selain itu diberikan 10% dari dana desa untuk perbaikan atau rehabilitasi kantor desa. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan beberapa desa untuk bisa lebih meningkatkan status desa mereka.

2. Persentase Desa Swasembada didukung oleh *Program Administrasi Pemerintahan Desa*. Kegiatan *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* dengan total anggaran sebesar **104.601.228,-** dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. **101.981.850,-** atau **97,50%** dari anggaran dengan capaian kinerja sebesar **162,50%** dari target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atas target sasaran “Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa” untuk indikator 1 adalah sebesar **109,05%** yang berarti masuk dalam kategori “**Sangat berhasil**”. Dan untuk indikator 2 capaian kinerja sebesar 162,50% yang berarti masuk dalam kategori “**Sangat berhasil**”.

DESA BERSTATUS SWASEMBADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ekonomi Masyarakat	Pendidikan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Kedaulatan Politik Masyarakat	Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks	Klasifikasi
1	Binuang	PUALAM SARI	0,57	0,68	0,92	1,00	0,71	1,00	0,81	SWASEMBADA
2	Tapin Selatan	LAWAHAN	0,61	0,71	0,81	1,00	0,87	1,00	0,83	SWASEMBADA
3	Tapin Selatan	TIMBAAN	0,59	0,70	0,80	1,00	0,82	0,89	0,80	SWASEMBADA
4	Tapin Selatan	HARAPAN MASA	0,89	0,71	0,84	0,95	0,78	0,67	0,81	SWASEMBADA
5	Salam Babaris	KAMBANG HABANG LAMA	0,66	0,67	0,87	1,00	0,83	1,00	0,84	SWASEMBADA
6	Salam Babaris	SUATO LAMA	0,63	0,62	0,81	1,00	0,76	1,00	0,80	SWASEMBADA
7	Tapin Tengah	SERAWI	0,66	0,74	0,88	1,00	0,76	0,89	0,82	SWASEMBADA
8	Tapin Tengah	KEPAYANG	0,89	0,70	0,79	1,00	0,91	0,89	0,86	SWASEMBADA
9	Bungur	PARING GULING	0,78	0,73	0,77	1,00	0,79	0,78	0,81	SWASEMBADA
10	Bungur	RANTAU BUJUR	0,60	0,72	0,87	1,00	0,75	0,89	0,80	SWASEMBADA
11	Bungur	HANGUI	0,70	0,72	0,93	1,00	0,83	0,82	0,84	SWASEMBADA
12	Bungur	BUNGUR	0,63	0,61	0,92	1,00	0,79	1,00	0,83	SWASEMBADA
13	Piani	BARAMBAN	0,63	0,69	0,92	1,00	0,79	0,78	0,80	SWASEMBADA
14	Piani	MIAWA	0,67	0,67	0,82	1,00	0,74	1,00	0,82	SWASEMBADA
15	Piani	BUNIIN JAYA	0,69	0,70	0,80	1,00	0,82	1,00	0,84	SWASEMBADA
16	Piani	BATU AMPAR	0,59	0,71	0,77	1,00	0,76	1,00	0,80	SWASEMBADA
17	Piani	PIPIKAT JAYA	0,57	0,70	0,85	1,00	0,85	0,89	0,81	SWASEMBADA
18	Piani	HARAKIT	0,57	0,78	0,69	1,00	0,82	1,00	0,81	SWASEMBADA
19	Piani	BATUNG	0,62	0,64	0,85	1,00	0,80	1,00	0,82	SWASEMBADA
20	Piani	BALAWAIAN	0,53	0,64	0,69	1,00	0,97	1,00	0,81	SWASEMBADA
21	Lokpaikat	AYUNAN PAPAN	0,53	0,64	0,93	1,00	0,86	0,89	0,81	SWASEMBADA
22	Lokpaikat	BITAHAN BARU	0,60	0,73	0,89	1,00	0,76	0,89	0,81	SWASEMBADA
23	Lokpaikat	BINDERANG	0,60	0,74	0,90	1,00	0,81	0,89	0,82	SWASEMBADA
24	Tapin Utara	BADAUN	0,74	0,52	0,83	1,00	0,73	1,00	0,80	SWASEMBADA
25	Tapin Utara	BANUA HANYAR	0,66	0,80	0,96	1,00	0,85	0,89		SWASEMBADA
26	Bakarangan	PARIGI KECIL	0,50	0,69	0,91	1,00	0,74	1,00	0,81	SWASEMBADA
27	Bakarangan	PARIGI	0,57	0,78	0,91	1,00	0,76	1,00	0,84	SWASEMBADA
28	Bakarangan	BAKARANGAN	0,50	0,69	0,86	0,96	0,90	1,00	0,82	SWASEMBADA
29	Bakarangan	PAUL	0,56	0,82	0,88	1,00	0,87	1,00	0,85	SWASEMBADA
30	Bakarangan	WARINGIN	0,48	0,72	0,73	1,00	0,87	1,00	0,80	SWASEMBADA
31	Bakarangan	TANGKAWANG BARU	0,54	0,71	0,78	1,00	0,82	1,00	0,81	SWASEMBADA
32	Bakarangan	TANGKAWANG	0,50	0,68	0,80	1,00	0,82	1,00	0,80	SWASEMBADA
33	Bakarangan	GADUNG KERAMAT	0,45	0,78	0,74	1,00	0,94	1,00	0,82	SWASEMBADA
34	Bakarangan	KETAPANG	0,56	0,75	0,91	1,00	0,81	1,00	0,84	SWASEMBADA
35	Bakarangan	BUNDUNG	0,48	0,65	0,87	1,00	0,90	1,00	0,82	SWASEMBADA
36	Bakarangan	GADUNG	0,45	0,67	0,88	1,00	0,92	1,00	0,82	SWASEMBADA
37	Bakarangan	MASTA	1,00	0,70	0,88	1,00	0,81	1,00	0,90	SWASEMBADA
38	Candi Laras Selatan	PABAUNGAN PANTAI	0,67	0,54	0,92	1,00	0,79	0,89	0,80	SWASEMBADA

39	Candi Laras Selatan	BARINGIN A.	0,67	0,69	0,89	1,00	0,83	0,78	0,81	SWASEMBADA
----	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Desa swasembada adalah jenis desa di mana masyarakatnya dapat memenuhi sebagian besar, jika tidak semua, setidaknya kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat desa swasembada sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa secara optimal. Mereka tidak bergantung secara signifikan pada pasokan dari luar desa untuk makanan, air, energi, dan barang-barang penting lainnya.

Desa Swasembada adalah konsep pembangunan desa yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat desa. Dalam desa swasembada, masyarakat desa berupaya untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri secara mandiri, dengan mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor agribisnis lainnya. Desa swasembada berfokus pada peningkatan produksi pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, dan peningkatan akses pasar bagi produk pertanian desa. Dengan menjadi desa swasembada, desa dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

	Desa	Output / Hasil Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai BerAKHLAK	Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi	Dokumentasi Kegiatan
Kabupaten Tapin	<ol style="list-style-type: none"> Dari total 12 Kecamatan dan 126 Desa yang ada sebanyak 39 desa yang sudah berstatus swasembada dan sebanyak 87 desa yang berstatus swakarya. Seluruh kepala desa dan seluruh perangkat desa yang ada sudah tercover BPJSnya. Dari total 12 kecamatan dan 126 desa 124 desa yang sudah menyepakati batas wilayahnya 	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong Pemerintah Desa untuk meningkatkan status desanya berdasarkan hasil dari profil desa Memberikan reward kepada desa yang mampu menaikkan status desanya menjadi swasembada Memberikan bimbingan dan memonitoring seluruh desa di kabupaten tapin 	<ol style="list-style-type: none"> Berorientasi Pelayanan Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Akuntabel Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas semua kegiatan Kompeten Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas Harmonis Berdiskusi, mendengarkan dengan baik dan menghargai setiap pendapat yang di sampaikan Loyal Menjaga kerahasiaan serta mengikuti arahan yang positif dari pimpinan terkait tindak lanjut kedepan Adaptif Memberikan referensi tata kelola BUMDes yang sudah baik dengan studi kasus desa yang sudah berhasil Kolaboratif Berkolaborasi dengan OPD terkait, pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa tenaga ahli tingkat kabupaten dan pendamping desa tingkat kecamatan/lokal desa, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan Swasta. 	<p>Kegiatan ini sejalan dengan visi misi organisasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan serta pemanfaatan potensi lokal desa Meningkatkan SDM masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana pedesaan Mengembangkan dan mendayagunakan sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat pedesaan Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa 	

Faktor pendukung tercapainya Indikator Kinerja diatas selain dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas terdapat pula faktor-faktor pendukung lainnya, antara lain :

- Hadirnya inovasi **GEPPREK PEDES** di tahun 2020 akhir yang visi dan misinya menggerakkan perekonomian Desa dengan memfasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi yang ada di Desa melalui BUMDesa, BUMDesMa, dan POSYANTEK Kecamatan/Desa
- Adanya pembinaan yang masif dan terstruktur serta berkelanjutan dari Bidang PPUED mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desadengan melibatkan OPD terkait di Kabupaten Tapin dan kerjasama BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan Swasta.
- Sumber daya aparatur desa, pengelola BUMDesa, BUMDesMa, POSYANTEK Kecamatan/Desa yang semakin membaik melalui kegiatan sosialisasi berupa Rembug BUMDesa/BUMDesMa dengan metode pembinaan, *workshop*, *capacity bulding*, study tiru, dan bimbingan teknis serta pendampingan Tenaga Profesional Program P3MD dari Kementerian DesaPDTT yang ditugaskan di Kabupaten Tapin. Bidang PPUED juga di dukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Tapin.

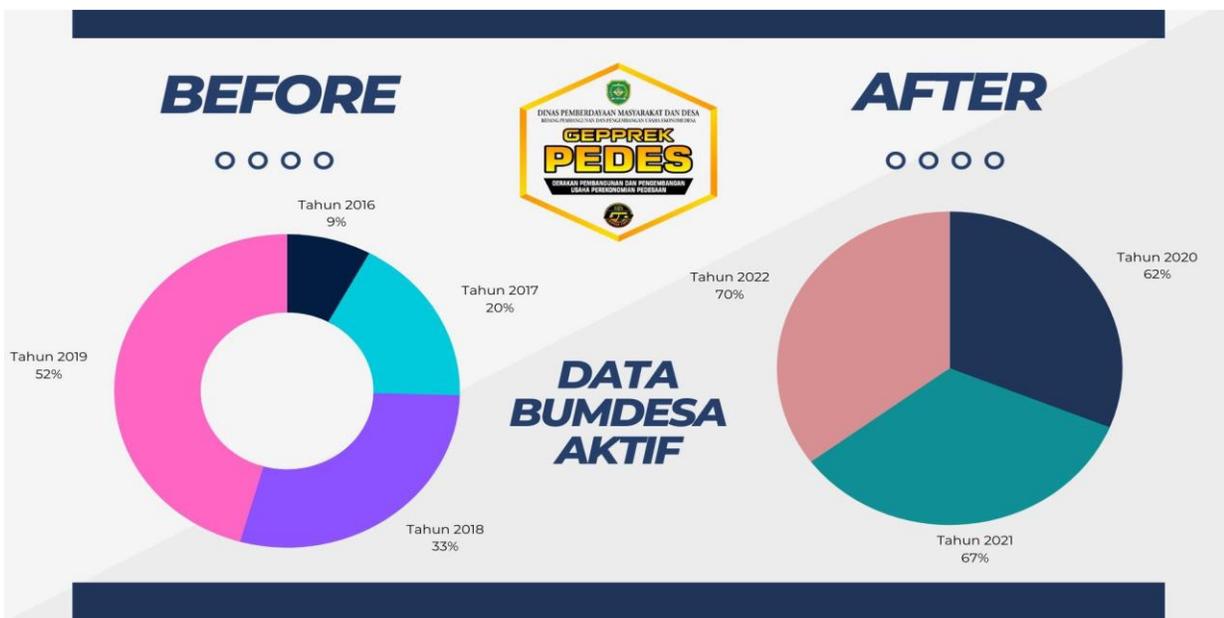
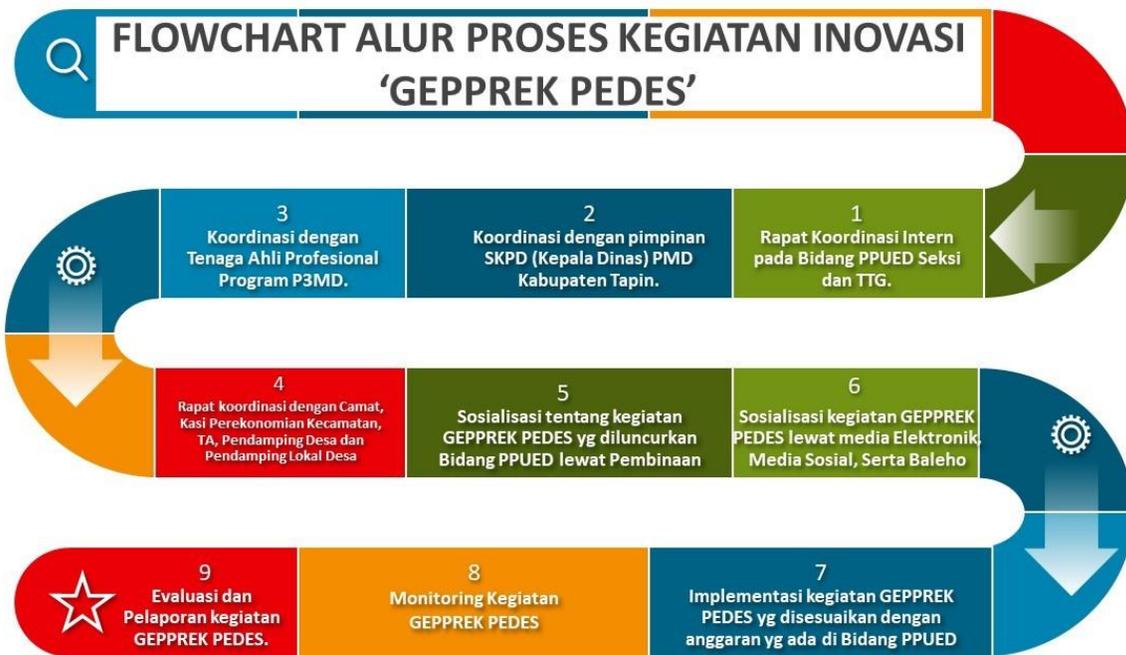
Dari metode-metode penunjang keberhasilan tercapainya indikator kinerja dan faktor penunjang lainnya maka bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa menghasilkan Outcome antara lain :

a. BUMDesa

1. Diraihnya penghargaan dan juara pertama (1) lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 (BUMDesa Mitra Hidayah Mandiri, Desa Bitahan Baru, Kecamatan Lokpaikat)
2. Menjadi BUMDesa pertama di Kalimantan Selatan bahkan di Indonesia yang mampu menjalin kerjasama dengan (RSUD) sebagai penyedia bahan makanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Tahun 2023. (BUMDesa Mandiri Sejahtera, Desa Kakaran, Kecamatan Tapin Utara).

b. BUMDesMa :

Diraihnya penghargaan tingkat Nasional BUMDesMa Inspiratif kategori “Cepat Tumbuh” pada peringatan hari BUMDesa Nasional di Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan unit usaha PERTASHOP yang diraih oleh (Badan Usaha Milik Desa Bersama Surya Maju Abadi Kecamatan Hatungun).







Bupati: Selamat BUMDesma Hatungun



Bupati: Selamat BUMDesma Hatungun

RANTAU - Bupati Tapin M Arifin Azjan tak hanya mempersembahkan penghargaan, Pulaunya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesma) Tapin yang meraih gelar di tingkat nasional berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga, karena penghargaan ini sangatlah luar biasa. Ia yakin dengan prestasi ini bisa dijadikan sebagai pemacu kegiatan di daerah.

"Selamat kepada BUMDesma Kecamatan Hatungun, kita semua bangga dengan prestasi ini," ucap Bupati Tapin M Arifin Azjan, Jumat (12/2).

Dikatakan, sebagai kepala desa desa di Tapin yang mulai berkembang dengan semangat reformasi desa, salah satunya dengan membuat BUMDesma.

"Dengan ini kita berharap anak-anak desa yang semangat, semoga kedepannya desa-desa di Tapin bisa mandiri," ujarnya.

Ia berharap kepada 120 desa yang ada di Bumi Hutan Hutan, terus berinovasi dan mengembangkan usaha-usaha BUMDesma maupun BUMDesma.

"Sangat semangat dengan desa yang ada di Tapin bisa bersaing dengan desa lain yang ada di seluruh Indonesia," harapnya.

Carut Hatungun, Sialim Suryanto menambahkan, penghargaan ini adalah bentuk apresiasi Kabupaten Tapin dan Kabid BPT BUMDesma Surya Maja Alahdi Kabupaten Hatungun yang telah menunjukkan komitmen dan semangat dalam membangun desa-desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Bupati Tapin Arifin Azjan



BUMDesma di Tapin Juara Nasional

PENGHARGAIAN BUMDesma Surya Maja Alahdi Kecamatan Hatungun meraih 2 Gelar di Tingkat Nasional dan Berhasil Menjuarai Penghargaan.

RANTAU - Badan Usaha Milik Desa (BUMDesma) Kecamatan Hatungun berhasil meraih juara pertama BUMDesma berprestasi tingkat nasional kategori petani perikanan air tawar (KAT) pada ajang kompetisi ini.

Pemilihan penghargaan Lomba Hari BUMDesma diberikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Kamis (22/2) yang digelar di Kabupaten Jember.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapin mengatakan bahwa BUMDesma di Tapin merupakan organisasi yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. "Salah satu indikator keberhasilan prestasi ini adalah kemampuan BUMDesma dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa," ucapnya.

Sementara itu, Direktur BUMDesma Surya Maja Alahdi, Eko Purmono mengatakan bahwa BUMDesma di Tapin merupakan organisasi yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. "Salah satu indikator keberhasilan prestasi ini adalah kemampuan BUMDesma dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa," ucapnya.

Sementara itu, Direktur BUMDesma Surya Maja Alahdi, Eko Purmono mengatakan bahwa BUMDesma di Tapin merupakan organisasi yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. "Salah satu indikator keberhasilan prestasi ini adalah kemampuan BUMDesma dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa," ucapnya.



BUMDes Mitra Hidayat Mandiri Raih Penghargaan Terbaik Pertama Tingkat Kalsel

Rantau, BARITO

Prestasi membanggakan kembali di raih Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya BUMDes Mitra Hidayat Mandiri Desa Bitahan Baru, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin yang berhasil meraih penghargaan sebagai BUMDes terbaik pertama tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar bertepatan di BUMDes Expo di Banjarbaru beberapa waktu lalu.

Penjabat Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin mengaku ini merupakan prestasi yang membanggakan ini, dan atas upaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam membina desanya.

"Ini merupakan suatu bukti, BUMDes kita sudah berkembang dengan baik,"

katanya.

Melihat prestasi ini, Muhammad Syarifuddin berjanji akan terus mendorong semua desa untuk bisa meningkatkan potensi yang ada di wilayah masing-masing dengan BUMDes. Karena kita melihat bahwa masing-masing desa memiliki potensi untuk di kembangkan.

"Semua desa kita lihat memiliki potensi untuk di kembangkan sebagai BUMDes," ujarnya.

Salah satunya seperti pemikiran Desa Bitahan Baru lewat BUMDesnya yang membuat inovasi besi bekas bisa jadi barang yang bernilai dan bekerjasama dengan perusahaan setempat.

"Bukan tidak mungkin di desa lain juga ada potensi yang sama, bahkan lebih," paparnya.

Kepala Dinas PMD melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Ekonomi Desa Iwan Satriansyah mengatakan,

dengan adanya penghargaan ini, BUMDes di Kabupaten Tapin berhasil meraih penghargaan tiga tahun berturut-turut Tapin mendapat prestasi, dari tahun 2021 mendapat predikat terbaik keempat tingkat Provinsi Kalsel, 2022 terbaik kedua tingkat Provinsi Kalsel.

"Tahun ini Alhamdulillah terbaik pertama tingkat Provinsi Kalsel," ujarnya.

BUMDes ini karena dinilai banyak prestasi yang dihasilkan. Termasuk selama dua tahun berturut-turut merupakan penghasil PADes tertinggi di Tapin.

"Untuk 2023 saja PADesnya sudah mencapai Rp50 juta," ucapnya.

Bukan hanya berprestasi menghasilkan PADes, tapi

memiliki organisasi yang solid di desanya, terbukti dari unit usaha yang ada. Termasuk bekerjasama dengan perusahaan setempat.

"Adapun usahanya mulai jual beli besi bekas, penyediaan sarana angkutan batu bara, catering untuk perusahaan, penyedia air bersih dan penyedia air minum untuk masyarakat," sebutnya.

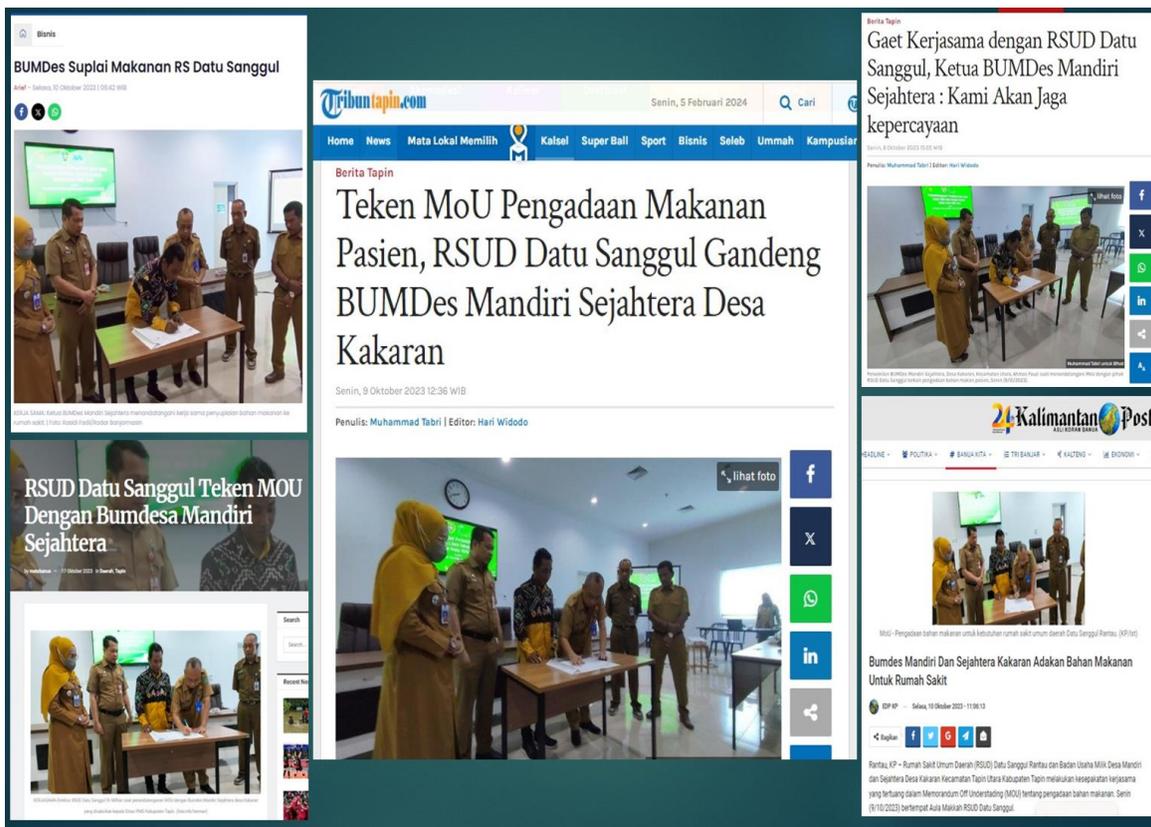
Lalu ada unit usaha peternakan ayam petelur, yang juga bisa membantu ketahanan pangan di sana.

"Yang membanggakan BUMDes ini sama sekali belum pernah menerima pernyataan modal dari desanya, tapi bisa menyumbang PADes terbesar di Tapin," bangganya.

Sementara itu, Mine Support Operasional PT BRE, Joko Bagiono mengaku bangga bahwa PT Bhumih Rantau Energi turut serta mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas pembinaan BUMDes.

"Ini merupakan salah satu komitmen perusahaan untuk mengembangkan desa di lingkungan perusahaan," ujarnya.min/sop





3.1.2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2021

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja DPMD pada LKjIP Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis perbandingan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target). Pada tahun 2023 dilakukan Perubahan Renstra 2018-2023 dan revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang relevan terhadap perkembangan organisasi. Analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan 2022 dengan Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja			
			2021		2022	
			T	R	T	R
1	Meningkatnya Status Desa di Kabupaten Tapin	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,680	0,682	0,700	0,7253
		Persentase Desa Berstatus Maju	21,428%	21,428%	32,539 %	76,985 %
		Persentase Desa Berstatus Swasembada	6,349%	6,349%	12,698 %	13,492 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05	75,75	98,31%
2	Meningkatnya ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	47,1	94,2%
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	8,73%	9,52%	109,05%
		Persentase Desa Swasembada	19,047%	30,952%	162,50%

3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Analisis capaian kinerja DPMD pada LKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan capaian indikator sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05	75,75	98,31%
2	Meningkatnya ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	47,1	94,2%
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	8,73%	9,52%	109,05%
		Persentase Desa Swasembada	19,047%	30,952%	162,50%

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menemui beberapa kendala dalam meningkatkan Status desa yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa disebabkan kurangnya SDM yang kompeten.
3. Peran lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa belum maksimal
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa yang

belum maksimal.

6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan.
7. Kurangnya koordinasi dan aksi dari instansi dalam usaha meningkatkan status Desa berdasarkan penilaian IDM

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencoba mengatasi kendala tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh ke Pemerintah desa dan Lembaga- Lembaga Desa, Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a. Pembinaan terhadap pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
- c. Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
- d. Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa
- e. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa yang berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa
- f. Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang ada di desa.

Identifikasi isu merupakan proses pengamatan terhadap masalah yang timbul dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan rencana tindak lanjut dari suatu masalah. Berikut ini isu masalah yang paling banyak ditemukan pada 12 Kecamatan dalam kegiatan Pembinaan Pengembangan BUMDesa :

1. Mayoritas BUMDes masih belum memiliki legalitas hukum
2. Pengelola BUMDes tidak aktif dan pasif dalam pengelolaan BUMDes, sehingga kegiatan usaha BUMDes tidak berjalan
3. Mayoritas Desa belum melakukan penyertaan modal kepada BUMDes di Tahun Anggaran 2023

Identifikasi isu ini menggunakan teknik analisis USG dengan menggunakan rentang penilaian (1-5). Dalam teknik USG, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

NO	Identifikasi Isu	Kriteria			Total	Peringkat
		U	S	G		
1	Mayoritas BUMDes masih belum memiliki legalitas hukum	5	5	5	15	1
2	Pengelola BUMDes tidak aktif dan pasif dalam pengelolaan BUMDes	5	3	5	13	2
3	Mayoritas Desa belum melakukan penyertaan modal kepada BUMDes di Tahun Anggaran 2023	3	5	3	11	3

- **Urgency** yaitu mendesak atau tidak isu tersebut untuk di bahas, dianalisis dan diselesaikan.
- **Seriousness** yaitu tingkat keseriusan dari isu yang harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.
- **Growth** yaitu tingkat perkembangan isu terkait apakah masalah tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah apabila tidak ditangani segera.

Skala Likert: (5: Sangat besar, 4: Besar, 3: Sedang, 2: Kecil, 1: Sangat kecil)

Berdasarkan hasil analisis USG diatas, maka diperoleh isu yang paling penting untuk diselesaikan yaitu Mayoritas BUMDes masih belum memiliki legalitas hukum. Hasil analisis ini akan kami jadikan fokus masalah dalam penyusunan rencana tindak lanjut kedepannya.

3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi Sumber Daya Bidang Bina Pemerintahan Desa yaitu :

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah yang memiliki indikator kinerja terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.
2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.
3. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang memiliki indikator kinerja tertatanya administrasi aset desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Analisis kinerja atas efisiensi sumber daya pada seksi administrasi keuangan dan aset desa, terdiri atas :

- a. Fasilitasi kerjasama sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja terlaksananya terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/kota dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.56.025.681.412,- dengan realisasi sebesar Rp.55.694.492.470,- atau 99,41% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.331.188.942,- dari total keseluruhan anggaran.

Realisasi yang hanya sebesar 99,41% dari pagu disebabkan oleh besar kecilnya keanggotaan Kepala desa dan Perangkat desa yang mendapat jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Pembayaran jaminan kesehatan Kepala desa dan perangkat desa untuk 126 desa se Kabupaten Tapin sebesar 4% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran dilakukan per bulan atau per triwulan, tergantung dari tagihan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan selaku penyedia jasa kesehatannya.
 - b. Rekonsiliasi BPJS kesehatan dilakukan antara BPJS kesehatan, BKAD, DPMD dan pihak Pemerintah Desa.
2. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang memiliki indikator kinerja tertatanya administrasi aset desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.180.406.239,- dengan realisasi sebesar Rp.175.674.400,- atau 97,38% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.731.839,- dari total keseluruhan anggaran. Realisasi yang hanya sebesar 97,38% dari pagu disebabkan oleh efisiensi sisa anggaran untuk nara sumber, karena nara sumber hanya menggunakan nara sumber dari DPMD dan dari Tim P3MD .

Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa kepada 126 Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin.
- b. Bimbingan teknis cara inventrisasi aset desa kepada 126 Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin.
- c. Monitoring pembuatan laporan inventarisasi aset desa kepada 126 Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin

Analisis kinerja atas efisiensi sumber daya pada seksi administrasi keuangan dan aset desa.

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa yang memiliki indikator kinerja tertatanya administrasi aset desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.45.133.023,- dengan realisasi sebesar 44.007.100,- atau 97,51% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.125.923,- dari total keseluruhan anggaran. Realisasi yang hanya sebesar 97,51% dari pagu disebabkan oleh tidak terlaksananya sosialisasi beberapa produk hukum untuk desa yang dikarenakan belum selesainya produk hukum tersebut di Pemerintah Daerah. Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
 - c. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - d. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun 2023.
 - e. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2023.
 - f. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Alokasi Dana Desa Tahun 2023.
 - g. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Juknis Penyusunan APBDesa tahun2023.
 - h. Sosialisasi peraturan Bupati yang telah diselesaikan penyusunannya kepada Pemerintah Desa.
2. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa yang memiliki indikator kinerja terlaksananya lomba desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.
- Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.104.601.228,- dengan realisasi sebesar Rp101.981.850,- atau 97,50% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.619.378,- dari total keseluruhan anggaran.
- Realisasi sebesar 97,50% dari pagu disebabkan oleh karena efisiensi dari kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi :

- a. Sosialisasi aplikasi Prodeskel dan Aplikasi Epdeskel.
 - b. Fasilitasi kepada Pemerintah desa berupa pengisian aplikasi Epdeskel.
 - c. Fasilitasi kepada Pemerintah desa berupa pengisian aplikasi Prodeskel
 - d. Pembentukan Panitia Lomba Desa.
 - e. Pelaksanaan lomba desa di tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten.
3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD yang memiliki indikator kinerja terpilihnya BPD dan meningkatnya kapasitas anggota BPD dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.
- Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.12.568.278,- dengan realisasi sebesar Rp.11.872.900,- atau 94,47% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.695.378,- dari

total keseluruhan anggaran.

Realisasi sebesar 94,47% dari pagu disebabkan oleh karena efisiensi dari kegiatan yang dilaksanakan berupa sisa dari sewa gedung, sewa sound sistem, nara sumber dan lain-lain.

4. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa yang memiliki indikator terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa dengan target IKU 100% dan realisasi target 100% serta capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini disediakan sebesar Rp.1.149.299.687,- dengan realisasi sebesar Rp.1.129.175.620,- atau 98,25% terealisasi dari pagu. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.20.124.067,- dari total keseluruhan anggaran.

Sisa anggaran sebesar Rp. 20.124.067,- atau 98,25% berupa sisa anggaran yang sudah tidak bisa di digunakan lagi.

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa meliputi :

- a. Pembayaran honorarium Satuan Tugas Desa sebanyak 7 (tujuh) orangselama 1 tahun anggaran.
- b. Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi administrasi 126 desa seKabupaten Tapin.

Tabel 3.6
Analisis Kinerja Atas Efisiensi
Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Tahun 2023

KEPALA					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,05	75,75	98,31%
2	Meningkatnya ASN Perangkat Daerah	Indeks profesionalisme ASN (IP- ASN) Perangkat Daerah	50	47,1	94,2%
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	8,73%	9,52%	109,05%
		Persentase Desa Swasembada	19,047%	30,952%	162,50%

SEKRETARIS					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	77,05	75,75	98,31%
2	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%	90%	100%
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10,31%	10,31%	100%
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Persentase BKAD yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan	50%	50%	100%
BIDANG PEMERINTAHAN DESA					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang ditata sesuai dengan ketentuan	60%	95%	158%
BIDANG PPUEB					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET IKU	REALISASI	CAPAIAN

1	Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status Bumdes Maju	5 %	4%	80%
---	--	--	-----	----	-----

3.1.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Permasalahan yang umum dihadapi pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Permasalahan internal meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien, serta keterbatasan modal. Sedangkan permasalahan eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, kurangnya pengalaman, serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan pelayanan dalam pengembangan BUMDesa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) masih belum mampu menjangkau secara luas, padahal pelayanan dalam pengembangan BUMDesa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) secara luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi pelaku usaha mikro di perdesaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga pengelolaan lembaga ekonomi yang ada di Desa dapat lebih mandiri serta mampu untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang dampaknya akan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi di masing-masing Desa.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengembangan BUMDesa dan TTG diharapkan dapat mempersiapkan dari segala perubahan kondisi baik lingkungan, sosial dan ekonominya. Kesiapan ini dimaksudkan agar BUMDesa dan TTG mampu beradaptasi atas segala perubahan yang terjadi, terutama dibidang ekonomi yang semakin dinamis. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bidang Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Desa (PPUED) Kabupaten Tapin senantiasa memfasilitasi serta mendampingi dan mengupayakan keberlangsungan usaha masyarakat di Desa.

NOVELTY GEPPREK PEDES

a. Pembinaan Terpadu Seksi PUED & TTG

b. Pemetaan Potensi Masalah

c. Rakor Kasi Ekonomi dan PD/PLD

d. Penetapan BUMDesa Percontohan

e. Pemberian Reward Workshop BUMDesa

f. Capacity Building BUMDesa & Posyantek

g. Rakor Pengelola BUMDesa & Posyantek

h. Pemberian Reward PD & PLD Terbaik

i. Pengusulan dan Revitalisasi BUMDesa

j. Pengembangan Produk Unggulan Desa

k. Pengembangan Unit Usaha BUMDesa

l. Kerjasama dengan BUMN & BUMD

m. Lomba TTG berjalan 2020 s.d 2023

n. Tersedianya Grup BUMDesa & Posyantek

o. Tersedianya Medsos Sbg Media Promosi

p. Kolaborasi pembinaan dgn SKPD Lain

ACTION DINAS PMD KAB. TAPIN

Berdasarkan kondisi yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Menyusun sebuah Program kegiatan “GERAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PEREKONOMIAN PEDESAAN” atau disingkat GEPPREK PEDES. Program kegiatan tersebut di hadirkan dengan berdasar kepada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan untuk Pembangunan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) sesuai dengan Permendes Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desayang telah terbentuk dimasing-masing Kecamatan.

KEUNGGULAN INOVASI GEPPREK PEDES

- 01 Dapat dilaksanakan secara Sustainable dan melibatkan berbagai stakeholder diantaranya Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Perusahaan, Lembaga Pendidikan serta Masyarakat.
- 02 Pendampingan dan fasilitasi BUMDesa / BUMDesMa menjadi lebih rutin serta terjadwal dengan baik. Mampu mengumpulkan seluruh lembaga yang ada di Desa untuk duduk bersama. Mampu meningkatkan SDM Desa untuk menggerakkan Ekonomi Desa.
- 03 Pendampingan dan fasilitasi BUMDesa / BUMDesMa menjadi lebih rutin serta terjadwal dengan baik. Mampu menggerakkan seluruh unsur yang ada di Desa untuk bersama membangun POSYANTEK Desa. Mampu meningkatkan SDM Desa untuk menggagas dan menciptakan Inovasi Teknologi Tepat Guna yang di butuhkan Masyarakat.





JENIS USAHA BUMDES

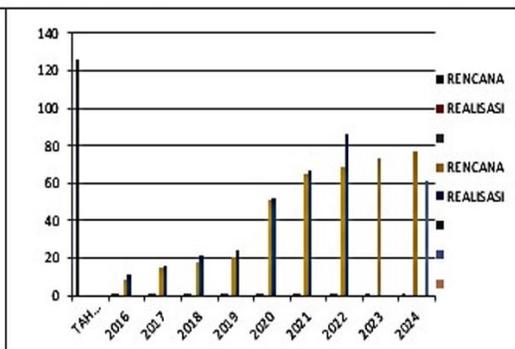
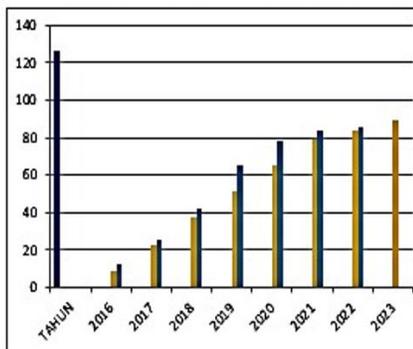
Jenis Usaha yang Dikembangkan oleh BUMDesa & BUMDesMa Di Kabupaten Tapin Diantaranya :



PROGRES PENDAFTARAN LEGALITAS BADAN HUKUM BUMDESA KAB. TAPIN

GRAFIK PERKEMBANGAN TARGET BUMDES AKTIF KABUPATEN TAPIN												
	TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RENCANA	126	7%	18%	29%	41%	52%	63%	66%	70%	74%	78%	82%
REALISASI		9%	20%	33%	52%	62%	67%	68%				
RENCANA	DESA	9	23	37	51	65	79	84	89	94	99	104
REALISASI	DESA	12	25	42	65	78	84	86				

GRAFIK PERKEMBANGAN TARGET PADES BUMDES KABUPATEN TAPIN												
	TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RENCANA	126	6%	12%	14%	16%	41%	52%	54%	57%	61%	64%	67%
REALISASI		9%	13%	17%	19%	41%	53%	68%				
RENCANA	DESA	8	15	18	20	51	65	69	73	77	81	85
REALISASI	DESA	11	16	21	24	52	67	86				



DOCUMENTASI



3.2 REALISASI ANGGARAN

Tahun 2023 DPMD Kabupaten Tapin melaksanakan 5 program dengan 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 65.773.761.790,00**. Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. **65.254. 880.363,00** atau **99,21%**. Dengan realisasi melebihi 90% dapat dikatakan DPMD berhasil dalam mencapai sasaran strategis.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja DPMD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan baik

**PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
			Penyediaan Bahan/Material		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Pengadaan Barang Milik Daerah			

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitas Tata Wilayah Desa
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusiadilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Program pendukung Sasaran 1 dan Sasaran 2 beserta realisasi dan capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.540.812	7.481.350	99,21	59.462

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.540.812	7.481.350	99,21	59.462
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.966.150.342	2.897.129.052	97,67	69.021.290
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.788.552	2.889186.452	97,68	68.602.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.892.958	2.607.600	90,14	285.358
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.468.342	5.335.0000	97,55	133.832
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.356.085.700	3.342.823.238	99,60	13.262.462
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.045.390	49.636.150	91,84	4.409.240
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.102.079.550	1.101.550.000	99,95	529.550
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.521.604	28.520.900	100,00	704
	Penyediaan Bahan/Material	26.992.456	26.980.500	99,29	11.956
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.985.200	4.950.000	99,61	35.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.139.461.500	2.131.185.688	90,60	13.262.462

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	407.840.000	406.410.000	99,65	1.430.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	407.840.000	406.410.000	99,65	1.430.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.073.053.936	6.973.202.695	98,59	99.851.241
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.634.228	8.630.000	99,95	4.228
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.054	64.479.423	85,97	10.520.631
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.116.000	152.373.000	98,87	1.743.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintah Daerah	97.686.800	93.876.632	98,59	3.810.168
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.376.800	52.996.632	95,70	2.380.168
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.160.000	32.085.000	99,77	75.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.150.000	8.795.000	86,65	1.355.000

Sedangkan untuk Program pendukung Sasaran 3 beserta realisasi dan capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.149.299.687	1.129.175.620	98,25
	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	45.133.023	44.007.100	97,51
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	197.339.503	196.482.200	99,57

	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	256.679.274	256.565.000	99,96
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	315.359.211	311.002.270	98,62
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.149.299.687	1.129.175.620	84,89
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	180.406.239	1.129.175.620	97,38
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	12.568.278	11.872.900	94,47
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	104.601.228	1.129.175.620	97,50
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
II	Pemberdayaan Lembaga	1.071.453.706	1.026.193.578	95,78
	Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota			

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	268.756.392	243.705.850	90,68
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lemabaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	321.750.706	301.911.210	93,83
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	187.250.838	187.143.150	99,94
	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	293.695.966	293.433.368	99,91

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.540.812	7.481.350	99,21	59.462
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.540.812	7.481.350	99,21	59.462
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.966.150.342	2.897.129.052	97,67	69.021.290
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.788.552	2.889.186.452	97,68	68.602.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.892.958	2.607.600	90,14	285.358
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.468.342	5.335.0000	97,55	133.832
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.356.085.700	3.342.823.238	99,60	13.262.462
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.045.390	49.636.150	91,84	4.409.240
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.102.079.550	1.101.550.000	99,95	529.550
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.521.604	28.520.900	100,00	704
	Penyediaan Bahan/Material	26.992.456	26.980.500	99,29	11.956
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.985.200	4.950.000	99,61	35.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.139.461.500	2.131.185.688	90,60	13.262.462

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	407.840.000	406.410.000	99,65	1.430.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	407.840.000	406.410.000	99,65	1.430.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.073.053.936	6.973.202.695	98,59	99.851.241
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.634.228	8.630.000	99,95	4.228
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.054	64.479.423	85,97	10.520.631
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.116.000	152.373.000	98,87	1.743.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintah Daerah	97.686.800	93.876.632	98,59	3.810.168
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.376.800	52.996.632	95,70	2.380.168
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.160.000	32.085.000	99,77	75.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.150.000	8.795.000	86,65	1.355.000
II	PROGRAM PENATAAN DESA				
	Penyelenggaraan Penataan Desa	454.272.853	431.816.000	95,06	22.456.853
	Fasilitas Tata Wilayah Desa	454.272.853	431.816.000	95,06	22.456.853
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	56.025.681.412	55.694.492.470	99,41	331.188.942
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	56.025.681.412	55.694.492.470	99,41	331.188.942
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.149.299.687	1.129.175.620	98,25	20.124.067

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	45.133.023	44.007.100	97,51	1.125.923
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	197.339.503	196.482.200	99,57	857.303
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	315.359.211	311.002.270	98,62	4.359.941
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	256.679.274	256.565.000	99,96	114.274
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	37.212.931	31.589.900	84,89	5.623.031
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	180.406.239	175.674.400	97,38	4.731.839
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	12.568.278	11.872.900	94,47	695.378
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	104.601.228	101.981.850	97,50	2.619.378
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.071.453.902	1.026.193.578	95,78	45.260.324
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	268.756.392	243.705.850	90,68	25.050.542
	Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lemabaga Adat	321.750.706	301.911.210	93,83	19.839,496

	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	187.250.838	187.143.150	99,94	107.688
	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	293.695.966	293.433.368	99,91	262.598
	<i>Jumlah</i>	65.773.761.790	65.254.880.363	99,21	518.881.427

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2023 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 26.A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2023, DPMD Kabupaten Tapin menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2023. Dengan penilaian secara mandiri, capaian kinerja secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin berdasarkan realisasi anggaran memperoleh nilai **99,21%** dengan kategori capaian **Berhasil**, dan untuk rata-rata capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja DPMD untuk tahun 2023 sebesar **116,01%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**

Dan kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas, masih terdapat banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LAKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

A. SARAN

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2023, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menentukan suatu target indikator sasaran kegiatan program pada dokumen Penetapan Kinerja agar lebih diperhatikan, karena hal ini akan berdampak atas capaian kinerja sebagai pelaksana kegiatan secara berkala.
2. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DPMD Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

**KEPALA DPMD,**

Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

